

ETNOGRAFI VIRTUAL PRAKTIK *DIGITAL VIGILANTISM* NETIZEN DI THREADS PADA KASUS TUMBLER TUKU

Seviola Dwi Ari Sandy¹, Augustin Mustika Chairil²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

122043010084@student.upnjatim.ac.id, augustin.mustika.ilkom@upnjatim.ac.id,

ABSTRACT

This research is motivated by the Tumbler Tuku case, which was widely discussed on various social media. The netizens' responses, which tended to be against it, were prominent and even resulted in real consequences, such as the loss of a job for one of the parties involved. This case then received widespread attention from online media and was linked to the phenomenon of digital vigilantism. This study aims to analyze how digital vigilantism practices were carried out by netizens on Threads in the Tumbler Tuku case. The method used was a descriptive qualitative approach with virtual ethnography according to Christine Hine, and used Trottier's concept of digital vigilantism and Henry Jenkins' theory of participatory culture as the basis for analysis. Data were collected through observation and literature review. The results of the study indicate that digital vigilantism practices carried out by netizens include naming, shaming, online harassment, doxing, reporting to the workplace to get the target fired, and proposing a boycott of PT KAI to stop using train services. The targets were not only the main perpetrator, but also extended to other parties such as husbands and KAI staff. This practice manifests itself in various forms of digital expression, both verbal and nonverbal, as a form of collaboration among netizens to create a deterrent effect and exert social pressure, as a form of social sanction, as well as an effort to uphold justice and damage the target's reputation. Repost and share features also accelerate the spread of information. Netizen participation in this practice has been shown to have significant social and economic impacts on the targeted parties.

Keywords: *Digital vigilantism, Threads, Netizens, KAI, Tumbler Tuku*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Tumbler Tuku yang sempat ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Respons netizen yang cenderung kontra terlihat menonjol dan bahkan berujung pada konsekuensi nyata, seperti hilangnya pekerjaan salah satu pihak yang terlibat. Kasus ini kemudian mendapat perhatian luas dari media online dan dikaitkan dengan fenomena *digital vigilantism*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *digital vigilantism* dilakukan oleh netizen di Threads pada kasus Tumbler Tuku. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan etnografi virtual menurut Christine Hine, serta menggunakan konsep *digital vigilantism* dari Trottier dan teori *participatory culture* dari Henry Jenkins sebagai landasan analisis. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *digital vigilantism* yang dilakukan netizen meliputi *naming, shaming, online harassment, doxing*, pelaporan ke tempat kerja agar target dipecat, serta pangajuan boikot

terhadap PT KAI agar target tidak lagi menggunakan layanan kereta api. Target yang disasar tidak hanya pelaku utama, tetapi juga meluas ke pihak lain seperti suami dan staf KAI. Praktik ini muncul dalam berbagai bentuk ekspresi digital, baik verbal maupun nonverbal, sebagai bentuk kerja sama netizen untuk memberikan efek jera dan tekanan sosial, sebagai sanksi sosial, sekaligus sebagai upaya menegakkan keadilan dan merusak reputasi target. Fitur *repost* dan *share* turut mempercepat penyebaran informasi. Partisipasi netizen dalam praktik ini terbukti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pihak yang menjadi target.

Kata Kunci: *Digital vigilantism*, Threads, Netizen, KAI, Tumbler Tuku

A. Pendahuluan

Ruang digital semakin dipenuhi oleh berbagai kasus viral yang menarik perhatian dan menjadi bahan perbincangan publik dalam beberapa tahu terakhir (Widiastuti, 2019). Salah satu kasus yang sempat ramai adalah kasus Tumbler Tuku. Kasus ini bermula dari unggahan seorang pengguna Threads, Anita Dewi, yang menceritakan kehilangan botol minum bermerek Kopi Tuku saat menggunakan *Commuter Line* rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Dalam unggahannya, Anita menyalahkan petugas KAI atas kejadian tersebut dan menyertakan tangkapan layar komunikasi dengan pihak KAI yang dinilai tidak memberikan solusi.

Namun, pihak KAI melalui Argi kemudian memberikan klarifikasi di unggahan yang sama dengan menjelaskan kronologi secara lebih lengkap serta menunjukkan bukti percakapan yang mengindikasikan

bahwa solusi sebenarnya telah ditawarkan. Situasi ini memicu berbagai respons dari netizen yang dikenal cepat dalam menerima dan menanggapi informasi di media sosial (Prasetya et al., 2022). Mayoritas respons yang muncul cenderung kontra terhadap Anita dan suaminya, bahkan berdampak hingga Anita kehilangan pekerjaannya.

Kasus ini juga mendapat perhatian media online, salah satunya *milenianews.com*, yang mengaitkannya dengan fenomena digital vigilantism. Secara konseptual, *digital vigilantism* merujuk pada tindakan “main hakim sendiri” di ruang digital, yaitu ketika sekelompok individu berusaha mengontrol perilaku yang dianggap menyimpang di luar jalur hukum (Loveluck, 2021). Dalam konteks ini, netizen bertindak sebagai “hakim sosial” yang menilai benar atau salah perilaku seseorang berdasarkan persepsi dan kesepakatan kolektif.

Peran media sosial sebagai ruang kritik turut mendorong pengguna untuk mengekspresikan pendapat secara lebih bebas, bahkan berpotensi melampaui batas norma sosial (Santosa, 2023). Selain itu, fitur-fitur yang tersedia memungkinkan penyebaran informasi berlangsung cepat dan menjangkau audiens luas. Threads sebagai platform yang digunakan dalam kasus ini memiliki karakteristik serupa dengan X, seperti fitur posting, komentar, balasan, *mention*, *like*, *share*, dan *repost* (Genggam et al., 2024).

Kasus Tumbler Tuku menunjukkan bahwa satu unggahan di media sosial dapat berkembang menjadi isu besar yang melibatkan banyak pengguna dan berdampak pada kehidupan pribadi seseorang. Fenomena *digital vigilantism* dalam kasus ini menarik untuk dikaji karena berbeda dari umumnya, yakni terjadi sebagai respons terhadap pelanggaran yang relatif sederhana, bukan pelanggaran berat. Selain itu, kajian mengenai *digital vigilantism* di Indonesia, khususnya pada platform Threads dengan metode etnografi virtual, masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik

digital vigilantism yang dilakukan oleh netizen di Threads pada kasus Tumbler Tuku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada netizen, khususnya pengguna media sosial, agar lebih bijak dalam merespons informasi, tidak mudah terpengaruh, serta tidak turut menyebarkan narasi yang berpotensi merugikan pihak lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi virtual yang dikemukakan oleh Christine Hine. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan mengeksplorasi aktivitas pengguna internet serta fenomena sosial budaya yang terjadi di ruang digital, khususnya media sosial. Objek penelitian difokuskan pada praktik *digital vigilantism* yang dilakukan oleh netizen di Threads pada kasus Tumbler Tuku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan secara daring, di mana peneliti terlibat langsung dalam ruang virtual tempat fenomena tersebut berlangsung. Selain itu, studi pustaka digunakan sebagai pendukung analisis dengan mengacu pada buku, jurnal penelitian

terdahulu, serta artikel media online yang relevan dengan topik *digital vigilantism*, etnografi virtual, dan kasus Tumbler Tuku.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik dari Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis meliputi membaca ulang data hasil observasi, mengidentifikasi dan memberi kode awal, membuat tema besar atau tema utama, kemudian mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema utama yang akan dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan dan kemudian menjabarkannya di bab hasil dan pembahasan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil seleksi dari temuan observasi. Peneliti memilih contoh-contoh unggahan Threads yang dianggap mewakili bentuk-bentuk praktik *digital vigilantism* sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, data yang dianalisis bukan seluruh populasi yang berkaitan dengan fenomena ini dan kasus ini, melainkan data yang dipilih dan dijabarkan di bab hasil dan pembahasan hanya sebagai perwakilan untuk menggambarkan pola dan cara netizen dalam

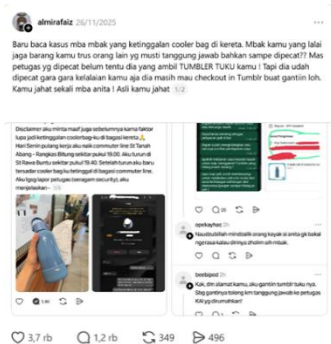
melakukan praktik *digital vigilantism*, tanpa mengulang data yang serupa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perilaku netizen di Threads pada kasus Tumbler Tuku dapat dipahami melalui konsep *digital vigilantism* yang dikemukakan oleh Trottier, yang mencakup praktik seperti *namings*, *shaming*, *doxing*, dan online harassment. Fenomena *digital vigilantism* berfungsi untuk mengekspos tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak pantas, baik yang dilakukan oleh individu biasa maupun figur publik (Octora & Andersen, 2026). Dalam kasus ini, respons netizen menunjukkan upaya untuk mengungkap dan menilai tindakan yang dianggap tidak tepat yang dilakukan oleh seorang pengguna Threads bernama Anita. Hal ini sejalan dengan pernyataan Octora dan Andersen (2026) dalam penelitiannya bahwa individu yang menjadi target eksposur tidak selalu berasal dari kalangan publik figur, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat umum.

Dalam konteks ini, Threads menjadi ruang bagi netizen untuk menyebut secara langsung nama individu yang dianggap bersalah

dalam kasus Tumbler Tuku. Salah satu contohnya terlihat pada unggahan pengguna Threads dibawah ini yang secara eksplisit menyebut nama Anita.



Gambar 1 Unggahan @almirafaiz

Penyebutan nama target utama yang dilakukan oleh pengguna Threads seperti gambar diatas ini dapat dipahami sebagai bentuk praktik *naming* yang memperkuat tindakan *shaming* di ruang publik digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan Trottier et al (2020) bahwa praktik *naming* berperan dalam memperkuat efek memermalukan (*shaming*). Akibatnya, individu yang identitasnya diungkap berpotensi mengalami stigma, penilaian negatif, serta tekanan sosial yang lebih luas dari publik.

Menyebarkan foto atau gambar yang menunjukkan perilaku seseorang yang dianggap salah merupakan bentuk *shaming* atau

upaya memermalukan individu di ruang publik digital (Loveluck, 2021). Dalam Threads pada kasus Tumbler Tuku, praktik ini terlihat melalui unggahan salah satu netizen pada gambar sebelumnya yang menampilkan tangkapan layar berupa dokumentasi isi Threads milik Anita yang dianggap sebagai bentuk kesalahan. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan netizen tersebut tidak hanya sebatas menyebut nama individu yang dianggap bersalah, tetapi juga memperlihatkan secara langsung perilaku individu tersebut kepada khalayak luas. Hal ini memperkuat praktik *shaming* karena publik tidak hanya mengetahui identitas target, tetapi juga disuguhkan bukti visual yang mendukung penilaian negatif terhadap target.

Tindakan memermalukan secara daring seringkali diikuti oleh aktivitas *doxing* (Octora & Andersen, 2026). *Doxing* didefinisikan oleh Saly dan Sulthanah (2023) dalam (Akbar et al., 2026) sebagai tindakan mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, seperti alamat, pekerjaan, hingga relasi sosial.

Dalam kasus Tumbler Tuku, praktik *doxing* terlihat melalui unggahan netizen sebelumnya yang menampilkan nama pengguna akun Threads milik Anita (@anitadewl). Tindakan tersebut kemudian juga diperluas oleh netizen lain dengan menyebarkan berbagai informasi pribadi, seperti akun media sosial lainnya milik target utama dan target lanjutan yakni Anita dan suaminya, riwayat pekerjaan mereka, identitas dan email suaminya, wajah mereka, biodata akademik mereka hingga akun media sosial perusahaan mereka bekerja. Salah satu contohnya terlihat pada balasan netizen kepada unggahan netizen lainnya seperti gambar di bawah ini yang menampilkan tangkapan layar akun Instagram tempat kerja mereka, disertai narasi yang mengungkap lokasi kerja Anita dan suaminya.



Gambar 2 Balasan @jumiiikkk

Praktik *doxing* juga meluas kepada pihak lain yang dianggap terlibat, seperti staf KAI. Hal ini terlihat

melalui unggahan @gomawo.2 yang menyebut nama Sondang Dairi Manulang sebagai pihak yang diduga terkait dengan pemecatan Argi sekaligus menyebarkan akun media sosialnya.



Gambar 3 Unggahan @juror.habo

Netizen lainnya seperti gambar diatas ini juga turut memperlihatkan wajah serta jabatan Sondang sebagai VP Internal Consultant PT KAI. Penyebaran identitas ini menunjukkan bahwa *doxing* tidak hanya berfokus pada target utama, tetapi juga menjangkau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus. Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik *doxing* yang dilakukan oleh netizen di Threads pada permasalahan Tumbler Tuku tidak hanya terwujud dalam bentuk teks, melainkan juga terwujud dalam bentuk gambar dan video. Lalu, netizen lainnya seperti gambar dibawah ini juga turut menampilkan wajah Anita dan suaminya disertai narasi bernada olok-olok dalam bentuk gambar.



Gambar 4 Balasan @bijiiketumbar



Gambar 5 Threads
@w.athie_nurhayati

Bentuk lain terlihat pada unggahan salah satu netizen seperti gambar diatas yang menampilkan video ilustrasi berbasis AI dari akun Instagram @gimanamii yang memuat wajah Anita dan suaminya. Penyebaran data pribadi target melalui visual ini dapat dipahami memperkuat praktik *shaming* dan perundungan daring karena memperluas eksposur serta mempertegas stigma terhadap target.

Fenomena ini menunjukkan bahwa individu dapat menjadi pelaku, korban, sekaligus target dalam praktik *digital vigilantism*. Anita sebagai target utama, serta suami dan staf KAI sebagai target lanjutan, mengalami eksposur yang meluas. Hal ini sejalan

dengan pernyataan Octora & Andersen (2026) bahwa sasaran *doxing* tidak hanya terbatas pada individu utama, tetapi juga melibatkan keluarga dan relasi sosialnya.

Secara keseluruhan, praktik *doxing* dalam kasus ini mencerminkan *digital vigilantism* yang bersifat kolektif dan meluas. Berbagai unggahan dan komentar netizen di Threads menunjukkan bagaimana tindakan ini dilakukan secara bersama-sama dengan cakupan target yang luas. Dengan demikian, fenomena ini sesuai dengan konsep *digital vigilantism* menurut Trottier, yaitu tindakan kolektif masyarakat di ruang digital untuk mengontrol dan menilai perilaku yang dianggap menyimpang.

Menurut Jelita & Akhirul (2024) *digital vigilantism* dapat terlihat melalui intimidasi dan kekerasan simbolis, seperti ujaran kebencian dan pengumbaran aib. Dalam kasus Tumbler Tuku, praktik ini tampak melalui berbagai unggahan dan komentar di Threads, seperti melalui fitur posting / unggahan Threads, melalui fitur komentar dalam unggahan Threads netizen lainnya, dan melalui fitur komentar dalam komentar Threads netizen lainnya. Ujaran kebencian ditujukan kepada

Anita sebagai target utama, serta suaminya dan Sondang sebagai pihak lain yang dianggap terlibat.

Contoh ujaran kebencian terlihat pada unggahan salah satu netizen pada gambar 1 yang menyebut Anita sebagai seseorang yang “jahat” dan “lalai”. Praktik ujaran kebencian seringkali dilakukan untuk mempermalukan objek yang dibenci (Afdal et al., 2021). Sehingga, pelabelan negatif ini dapat dipahami sebagai bentuk ujaran kebencian yang bertujuan merendahkan sekaligus mempermalukan target.

Selain itu, balasan *netizen* seperti gambar 4 juga menunjukkan ejekan kepada Anita dan suaminya, yang memperkuat praktik publik *shaming* di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa komentar negatif dapat mendorong pengguna lain untuk melakukan hal serupa, sehingga memperluas tekanan sosial terhadap target (Octora & Andersen, 2026).

Selain itu, contoh lainnya yakni balasan @slstyrynd_ terhadap unggahan @rizkiapr juga termasuk memberikan ujaran kebencian pada suami Anita dengan melabelinya sebagai “suami pelit”. Sementara itu, Sondang sebagai staf KAI juga

menjadi sasaran ujaran kebencian, seperti gambar dibawah ini. Gambar dibawah ini menunjukkan perilaku melabeli Sondang sebagai “manajer kaleng-kaleng” dan “dzolim”.



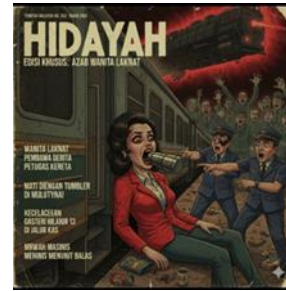
Gambar 6 Unggahan @iwan_wahyuaa

Ujaran kebencian dapat disampaikan melalui berbagai bentuk, baik verbal maupun nonverbal (Irawan, 2018). Secara verbal, ujaran kebencian dapat diekspresikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara itu, secara nonverbal, ujaran kebencian dapat diekspresikan dengan bentuk gambar, video, gestur tubuh, emoji, warna, dan bentuk visual lainnya (Kusumawati, 2015). Beberapa contoh Threads netizen sebelumnya merupakan praktik ujaran kebencian verbal berbentuk tulisan (teks). Namun, ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen di Threads pada kasus ini juga muncul dalam bentuk lainnya. Salah satunya seperti unggahan @dj_donny menampilkan video yang berisi hinaan berbentuk lisan kepada Anita dengan kata kasar “monyet”.



Gambar 7 Unggahan @nagisshop

Sementara itu, unggahan salah satu netizen lainnya seperti gambar diatas ini memperlihatkan parodi perilaku Anita melalui video yang dilengkapi teks dan gestur tubuh serta teks yang ada di luar video sebagai praktik ujaran kebencian dengan sindiran yang dilengkapi emoji sebagai penguat praktik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Charolin et al (2026), bahwa penggunaan emoji berguna sebagai penguat ujaran kebencian. Selain itu, unggahan Threads netizen lainnya seperti gambar dibawah ini, menampilkan ilustrasi karakter yang merepresentasikan Sondang dengan sangat tidak pantas dan disertai narasi kasar, juga dapat dipahami sebagai praktik ujaran kebencian dengan kombinasi verbal dan nonverbal.



Gambar 8 Unggahan @ratubangsawan_condetselatan

Dalam konteks ini, ujaran kebencian dapat dipahami sebagai kelanjutan dari praktik *doxing*. *Doxing* menjadi pintu masuk bagi tindakan lain, seperti ujaran kebencian, pelecehan secara personal, ancaman, bahkan pembunuhan (Putri, 2023). Pengguna media sosial yang kolektif, seringkali berperan layaknya penegak hukum informal, dengan memanfaatkan eksposur publik, tekanan massa, serta dengan melakukan berbagai bentuk penghukuman sosial lainnya (Elvina Ekga et al., 2026). Pada penelitian ini, netizen secara kolektif mengambil peran sebagai “penegak hukum” informal dengan melakukan berbagai bentuk penghukuman sosial yang beragam. Praktik *digital vigilantism* yang dilakukan oleh netizen di Threads pada persoalan Tumbler Tuku, terlihat tidak hanya berhenti pada eksposur identitas dan eksposur kesalahan target, tetapi berkembang

menjadi penghukuman sosial lainnya yang berbahaya dan merugikan target yang dilakukan secara massal di ruang digital seperti *doxing* dan ujaran kebencian di depan banyak publik.

Menurut Trottier et al (2020) *doxing* merupakan tindakan yang dapat memungkinkan terjadinya *online harassment*. Dalam penelitiannya yang berjudul *Digital Vigilantism as Weaponization of Visibility*, Trottier menegaskan bahwa *online harassment* merupakan salah satu bentuk dari praktik *digital vigilantism*. Dalam Threads pada persoalan Tumbler Tuku, praktik *online harassment* terlihat melalui interaksi antar-netizen, terutama di kolom komentar unggahan Threads Anita yang terlihat melalui unggahan salah satu netizen seperti gambar 1. *Online harassment* merupakan bentuk perundungan daring yang melibatkan tindakan melecehkan, mengintimidasi, atau menyerang individu secara personal melalui media digital seperti email, sms, jejaring sosial seseorang yang ingin dilecehkan atau diintimidasi dan sebagainya (Zain, n.d.)

Salah satu contohnya terlihat pada balasan @opekayhac terhadap unggahan Anita yang tertera dalam

unggahan netizen seperti gambar 1. @opekayhac menyebut Anita sebagai sosok yang tidak menyadari kesalahannya. Narasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk serangan personal yang ditujukan langsung kepada target utama. Hal ini menunjukkan bahwa komentar dalam ruang publik digital dapat berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang bersifat personal dan menyerang individu.

Praktik *online harassment* dalam kasus ini tidak hanya terjadi di Threads, tetapi juga meluas ke platform lain. Salah satunya, unggahan @azharwahid123 menunjukkan adanya ancaman untuk menyerbu rumah target yang dikirim melalui WhatsApp kepada Anita dan Alvin. Selain itu, unggahan @masbay_1984 memperlihatkan pesan yang dikirim melalui *direct message* Instagram kepada Sondang dengan narasi yang bernada sindiran. Hal ini menunjukkan bahwa serangan tidak hanya ditujukan kepada Anita sebagai target utama, tetapi juga kepada suaminya dan Sondang sebagai target lanjutan.

Dalam konteks *digital vigilantism*, *online harassment* dapat dipahami sebagai kelanjutan dari

praktik *doxing* yang sebelumnya menyebarkan data-data pribadi target (Trottier et al., 2020). Setelah data-data pribadi target tersebar, netizen lebih mudah melakukan serangan secara langsung melalui berbagai platform digital. Akibatnya, bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan komentar dalam komentar Threads lainnya, membuat unggahan Threads yang mengandung perundungan, memberikan komentar dalam unggahan Threads netizen lainnya, tetapi juga berkembang menjadi penghinaan, intimidasi dan ancaman personal yang lebih serius melalui jejaring media sosial target.

Dengan demikian, praktik *online harassment* dalam kasus ini menunjukkan adanya eskalasi tindakan penghakiman digital yang lebih ekstrem. Netizen tidak hanya berperan sebagai pengamat atau pemberi opini, tetapi juga secara aktif melakukan penghakiman sosial melalui berbagai bentuk serangan digital terhadap individu yang dianggap bersalah.

Dalam kasus Tumbler Tuku di Threads, praktik *digital vigilantism* juga tampak melalui upaya netizen untuk mendorong pemecatan target.

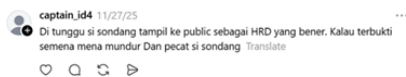
Kehilangan pekerjaan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk menekan korban agar berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang tidak aman (Trottier et al., 2020). Dengan kata lain, tindakan ini tidak hanya bertujuan memberi sanksi moral, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup target termasuk sosial dan ekonominya.



Gambar 9 Unggahan @om_b3wok

Hal ini terlihat melalui unggahan salah satu netizen seperti gambar di atas ini yang menampilkan *screenshoot* aksi pelaporan terhadap suami Anita melalui fitur ulasan Google Maps di tempat kerjanya. Dalam unggahan tersebut, tampak bahwa pelaporan dilakukan secara kolektif oleh sejumlah netizen yang mendesak pihak perusahaan untuk segera mengambil tindakan, termasuk memecat yang bersangkutan. Praktik serupa juga terjadi pada Anita, di mana melalui balasan @ayuksiap

terhadap @scremfat disebutkan bahwa lokasi tempat kerja Anita di Google Maps telah dipenuhi laporan dari netizen. Selain itu, target lain seperti Sondang juga tidak luput dari sasaran praktik ini. Terlihat dari balasan salah satu netizen seperti gambar dibawah ini yang menuntut agar Sondang bertindak sebagai HRD yang baik. Bahkan, salah satu netizen seperti gambar dibawah ini juga mengusulkan pemecatan jika memang Sondang terbukti bersalah.



Gambar 10 Balasan @captain_id4

Rangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa netizen juga secara aktif mengorganisasi tekanan kolektif terhadap institusi tempat target bekerja. Dampaknya nyata, salah satu target utama, yaitu Anita, pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat digunakan untuk menciptakan konsekuensi nyata bagi target. Dengan demikian, pelaporan massal kepada tempat kerja target sebagai dorongan pemecatan yang dilakukan netizen dapat dipahami sebagai bentuk eskalasi praktik *digital*

vigilantism. Jika dibandingkan dengan *online harassment*, tindakan ini memiliki tingkat ekstremitas yang lebih tinggi karena tidak hanya menyerang secara verbal atau psikologis, tetapi juga berupaya menjatuhkan kondisi ekonomi target secara langsung.

Tindakan netizen dalam kasus Tumbler Tuku tidak hanya berhenti pada tekanan terhadap tempat kerja atau pelaporan target ke tempat kerjanya, tetapi juga meluas ke pelaporan kepada institusi publik yang terkait. Hal ini terlihat dari balasan Threads salah satu netizen yakni, @mini_toko_ terhadap @rchdzsyks yang menyampaikan narasi permintaan boikot untuk Anita dan suaminya dengan menandai akun resmi @kai121_ dan @commuterline. Balasan tersebut menunjukkan bahwa netizen berupaya mendorong pembatasan akses layanan publik bagi target. Dengan demikian, praktik ini memperlihatkan eskalasi *digital vigilantism* yang semakin luas, yang mana netizen tidak hanya mencoba mempengaruhi netizen lainnya untuk melakukan praktik fenomena ini, melainkan juga mencoba memengaruhi institusi publik untuk memboikot target.

Fenomena *digital vigilantism* pada kasus Tumbler Tuku dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi sosial digital. Trottier (2020) menyebut praktik *digital vigilantism* sebagai sisi gelap keterlibatan daring. Sehingga, penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori *participatory culture* Henry Jenkins. Henry Jenkins mengemukakan aspek *affiliations*, *expressions*, *collaborative problem solving* dan *circulations* dalam teorinya.

Dalam teorinya, *affiliations* mengacu pada keterlibatan individu dalam komunitas daring yang terbentuk karena adanya kesamaan minat, identitas, atau tujuan bersama (Halimah et al., 2026). *Affiliations* pada konteks penelitian ini, netizen berpartisipasi secara sukarela untuk melakukan praktik *digital vigilantism* tanpa memiliki komunitas formal dan terjadi karena adanya kesamaan pandangan bahwa pihak-pihak seperti Anita, suaminya, dan Sondang dianggap melakukan kesalahan.

Pada aspek *expressions*, bentuk ekspresi netizen sangat beragam. Beberapa unggahan dan balasan Threads netizen sebelumnya, memperlihatkan penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal

dalam bentuk tulisan yang berdiri sendiri diluar gambar dan video, tulisan dalam gambar, tulisan dalam video, kata-kata dalam bentuk lisan dan gestur tubuh yang dikemas dalam bentuk video, gambar dan video yang menunjukkan data-data pribadi target dan bukti kesalahan target, gambar yang mengandung ujaran kebencian serta emoji. Beragam bentuk ekspresi ini digunakan oleh netizen untuk menghakimi target.

Sementara itu, pada aspek *collaborative problem solving*, netizen secara kolektif berupaya menyelesaikan kasus dengan menuntut keadilan untuk membela Argi, membuat target jera, untuk menekan target agar target segera menyelesaikan masalahnya, hingga merusak reputasi target melalui tindakan-tindakan yang berkaitan dengan fenomena *digital vigilantism*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nakamura (2014, 263) dalam jurnal (Jane, 2016), bahwa *digital vigilantism* digunakan untuk merepresentasikan *Do It Yourself Justice*, yang artinya keadilan ada di tangan mereka sendiri.

Jennifer Forestal dalam jurnal (Octora & Andersen, 2026) menyatakan bahwa tindakan

mempermalukan seseorang di ruang publik, dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi informal. Sehingga, praktik *digital vigilantism* dalam kasus Tumbler Tuku di Threads dapat dipahami sebagai wujud sanksi sosial yang bersifat informal.

Terakhir, pada aspek *circulations*, informasi terkait kasus Tumbler Tuku terus menyebar luas melalui fitur *repost* dan *share* di Threads. Unggahan maupun balasan netizen yang mengandung praktik *digital vigilantism* mengenai permasalahan Tumbler Tuku dengan cepat diteruskan ke pengguna lain, sehingga memperluas jangkauan audiens dan membuat kasus ini semakin viral bahkan menjadikan semakin banyak netizen lainnya yang turut melakukan praktik ini. Dengan demikian, partisipasi netizen tidak hanya berhenti pada produksi informasi melalui fitur unggahan dan komentar, tetapi juga pada distribusi yang memperkuat eskalasi isu di ruang digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, praktik *digital vigilantism* netizen di Threads pada kasus Tumbler Tuku muncul dalam berbagai bentuk yang

mencakup *naming*, *shaming*, *online harassment*, *doxing*, pelaporan ke tempat kerja agar target dipecat, hingga pengajuan boikot untuk target kepada institusi publik yang terkait seperti PT KAI. Rangkaian tindakan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan target. Selain itu, target penghakiman tidak hanya terbatas pada satu individu, tetapi meluas ke pihak lain yang dianggap terkait. Hal ini merupakan bagian dari budaya partisipatif karena memperlihatkan netizen yang bebas mengekspresikan penilaian mereka melalui unggahan dan komentar, baik secara verbal maupun nonverbal dengan berbagai bentuk ekspresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa netizen tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen yang aktif menyebarkan dan memperkuat isu. Melalui fitur *share* dan *repost*, unggahan beserta komentar netizen yang mengandung praktik *digital vigilantism* mengenai permasalahan Tumbler Tuku dapat tersebar luas, sehingga membuat kasus Tumbler Tuku semakin viral dan mendorong peningkatan praktik *digital vigilantism*. Partisipasi ini bersifat sukarela dan

kolektif, didorong oleh kesamaan pandangan bahwa tindakan pihak yang terlibat dianggap salah.

Praktik *digital vigilantism* juga dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama netizen untuk menyelesaikan masalah di ruang digital. Tindakan-tindakan tersebut berfungsi sebagai sanksi sosial informal tanpa melibatkan penegak hukum dengan tujuan menegakkan keadilan, memberi efek jera, merusak reputasi target, serta menekan target agar segera mengambil tindakan seperti klarifikasi atau permintaan maaf.

Dampaknya, secara sosial reputasi target menjadi buruk, dan secara ekonomi salah satu target berujung pada kehilangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, praktik *digital vigilantism* yang dilakukan oleh netizen secara kolektif ini juga mendorong munculnya klarifikasi, permintaan maaf, dan upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pengguna media sosial, khususnya di Threads, diharapkan lebih bijak dalam berpartisipasi agar tidak terlibat dalam praktik yang merugikan pihak lain. Selain itu, platform media sosial juga perlu memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap segala

informasi yang diproduksi oleh para pengguna untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Trottier, D., Gabdulhakov, R., & Huang, Q. (2020). *Introducing Vigilant Audiences*. Open Book Publisher.

Jurnal :

Afdal, A., Ningsih, T. P., Maharani, U. K., Vanessha, V., & Susanti, R. (2021). Perbedaan Kecendrungan Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Antara Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, 8(2), 1–13. <https://doi.org/10.36706/jkk.v8i2.15425>

Akbar, M. F., Tamara, G. M. A. J., & Hazel, M. (2026). Siber-Vigilantisme Pada Media Sosial dan Legitimasi Keadilan. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 5, 183–194.

Charolin, M., Valiza, I., Sani Harahap, M. F., Afarel, M. R., Br Manurung, A. S., Gafari, O. F., & Puspitarini, H. (2026). Fenomena Tumbler Tuku di KAI Dalam Perspektif Cyber Pragmatik. *BADASYA : Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 02(1), 31–38.

Elvina Ekga, F., hafida Pangastuti, N., Paramitha, A., & Iwan. (2026). Vigilantisme Digital NCTzen: Praktik Cancel Culture Kasus Moon Taeil. *Jurnal Media Dan*

- Komunikasi Indonesia*, 7(1), 1–166.
- Genggam, R. M., Bintang, S., Bahytsani, D. A., & Mudzakkar, A. A. (2024). Analisis Bukti Digital Forensik pada Aplikasi Threads Menggunakan Metode Digital Forensic Research Workshop. *FAHMA - Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 22(2), 1–10.
- Halimah, Ayuningrum, N. G., & Romadhan, M. I. (2026). Praktik Partisipasi Fandom Holo Pada Masa Perilisan dan Promosi Solo di Instagram @haechanoona (Studi Etnografi Virtual). *Journal of Socio Verba Humanica*, 1(1), 104–111.
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.712>
- Jane, E. A. (2016). Online Misogyny and Feminist Digilantism. *Continuum*, 30(3), 284–297. <https://doi.org/10.1080/10304312.2016.1166560>
- Jelita, A., & Akhirul, N. (2024). Vigilantisme Digital dalam Aksi Boikot Produk Israel di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6, 145–160.
- Kusumawati, T. I. (2015). Komunikasi Verbal Dan Nonverbal. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(2), 58–98.
- Loveluck, B. (2021). The Many Shades of *Digital vigilantism*. A Typology of Online Self-Justice. *Global Crime*, 21(3–4), 213–241.
- Muflichah, H. S. (2022). Cyberbullying Dalam Permainan Interaktif Berbasis Online. *AKRB: Jurnal Ilmu Komunikasi Akademi Komunikasi Radya Binatama*, 7(1), 1–20.
- Octora, R., & Andersen, C. (2026). Online *Shaming* as a Form of Digital Persecution, Legal Issue on Protection of Dignity and Privacy Rights of Victims in Indonesian Legal Framework. *Tec Empresarial*, 716–739.
- Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral Di Media Sosial. *JDCODE: Journal Of Digital Communication And Design*, 1(1), 1–12.
- Putri, D. H. (2023). *Pengaruh Doxing terhadap Mentalitas Korban Pengaruh Doxing terhadap Mentalitas Korban*.
- Santosa, D. R. (2023). Digital Discourses Mengenai Fenomena Cancel Culture Saipul Jamil dalam Media Sosial TikTok. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10272–10276. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3411>
- Trottier, D. (2020). Denunciation and *Doxing*: Towards a Conceptual Model of Digital Vigilantism. *Global Crime*, 21(3–4), 196–212. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1591952>
- Widiastuti, N. (2019). Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional. *JDMR: Jurnal Digital Media & Relationship*, 1(1), 23–30.
- Zain. (n.d.). *Definisi dan Bentuk Cyber Bullying*. Id.Scribd.Com. Retrieved June 20, 2026, from <https://id.scribd.com/document/468398244/Pengertian-Cyber-Bullying>